

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat

Nurul Hidayati Indra Ningsih
Universitas Muhammadiyah Mataram

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 02 Maret 2022 Publish: 14 Maret 2022</p>	<p><i>In order to create good governance, the Government of Indonesia continues to make various efforts to improve transparency and accountability of state financial managers. To find out the financial performance of the government, it is necessary to conduct an analysis of financial ratios. This research aims to find out how the government's financial statements at the Office of Population Control of Family Planning Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) west Lombok Regency.</i></p> <p><i>The type of research used is quantitative research, the data source in this study is secondary. The data collection methods used are documentation and Data Analysis Methods that use financial ratio analysis liquidity ratio (current ratio), solvency ratio (debt to assets), and expenditure efficiency ratio</i></p> <p><i>Based on the results of the study, it can be concluded that financial performance in DP2KBP3A is reviewed from the liquidity ratio measured, with the current ratio (current ratio) in 2006-2019 can be said to be good, the average current ratio for a period of four consecutive years has reached a ratio level of more than 1 although from year to year it is still decreasing. Judging from the solvency ratio measured from the Debt to Asset Ratio in 2006-2019 it can be said to be good because based on the results of the calculation is below the number 1 (one), meaning that DP2KBP3A is able to cover its debt through its own capital well. The efficiency ratio in 2016-2019 shows that the amount of budget received by DP2KBP3A is greater than the amount of DP2KBP3A spending, this can be seen from the average efficiency ratio value above 80% so that it is in an efficiency condition.</i></p>
<p>Keywords: <i>Financial Statements, Liquidity, Solvency, Spending Efficiency</i></p>	
<p>Info Artikel</p> <p>Article history: Diterima : 02 Maret 2022 Publis : 14 Maret 2022</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah laporan keuangan pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan Metode Analisis Data yang menggunakan analisis rasio keuangan Rasio Likuiditas (<i>Current Ratio</i>), Rasio Solvabilitas (<i>Debt to Assets</i>), dan Rasio Efisiensi Belanja.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada DP2KBP3A ditinjau dari rasio likuiditas yang diukur, dengan <i>current ratio</i> (rasio lancar) pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan baik, nilai rata-rata <i>current ratio</i> selama kurun waktu empat tahun berturut-turut sudah mencapai tingkat rasio lebih dari 1 meskipun dari tahun ke tahunnya masih mengalami penurunan. Ditinjau dari rasio solvabilitas yang diukur dari <i>Debt to Asset Ratio</i> pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan sudah baik karena berdasarkan hasil perhitungannya berada di bawah angka 1 (satu), artinya DP2KBP3A mampu menutup hutangnya melalui aktivitya sendiri dengan baik. Rasio efisiensi tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa jumlah</p>

anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, hal ini dapat di lihat dari nilai rasio efisiensi rata-rata diatas angka 80% sehingga berada dalam kondisi efisiensi.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Nurul Hidayati Indra Ningsih

Universitas Muhammadiyah Mataram

Indraningsih21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, Institusi ini diberikan tugas/kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri berdasarkan harapan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, membentuk departemen atau dinas yang melaksanakan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, pemerintah memerlukan dana yang dipungut dari masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, bea, cukai, dan juga sumbangan. Hasil dari pungutan ini digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sebagai salah satu usaha meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yaitu dengan menerapkan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman dasar dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

Efektivitas dan efisiensi realisasi penggunaan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu Jangan sampai anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik. Menurut Mardiasmo dalam Delima dkk (2016:1) kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah bersangkutan. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu untuk dilakukan pengukuran agar dapat diberikan suatu pernyataan keberhasilan pemerintah daerah dan dapat diidentifikasi perbaikan jika memang diperlukan.

Kinerja keuangan adalah suatu cara pengukuran pengelolaan keuangan organisasi atau perusahaan dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi"

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap laporan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya.

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan rasio Efisiensi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2016:129) menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Artinya jika perusahaan ditagih, perusahaan mampu untuk membayar hutang tersebut terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas juga berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Kasmir (2016:129).

Menurut Kasmir (2016:150), Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Seberapa besar hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (*dilikuidasi*).

Menurut Halim dan Muhammad (2012:234), Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan dari anggaran yang telah diterima". Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:13), Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivisme (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data angka yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, Metode Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu :

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu :

1. Rasio Likuiditas (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai hutangnya. Walaupun pemerintah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas (Mahmudi, 2016:109). Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya.

Dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Likuiditas (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas (*Debt to Assets*)

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Mahmudi (2016:111) menyatakan bahwa Rasio utang sangat penting bagi kreditor maupun calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian pinjaman. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh pihak kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar pinjaman atau utangnya.

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kasmir (2016:150), mendefinisikan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. seberapa besar hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dibubarkan (*dilikuidasi*).

Dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Menurut Halim dan Muhammad (2012:234), Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan dari anggaran yang telah diterima". Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Susanto (2019:83)

Dihitung dengan cara:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Likuiditas (*Current Ratio*)

Dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Likuiditas (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 1 Rasio *Current Ratio* Tahun Anggaran 2016-2019

No	Tahun Anggaran	Rasio Lancar
1	2016	800
2	2017	999
3	2018	545
4	2019	141

Sumber: Data Sekunder di olah

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar (*current ratio*) pada tabel 1 diatas, rasio lancar DP2KBP3A selama empat tahun berturut-turut baik karena lebih dari 1 satu. Tahun anggaran 2016 sebesar 800, dianggap baik karena nilainya lebih dari 1 (satu). Penyebab nilainya lebih dari 1 (satu) karena pada tahun 2016 jumlah utang lancar lebih kecil dibandingkan nilai aset lancarnya, sehingga pada tahun ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya. Pada tahun anggaran 2017 rasio lancar mengalami peningkatan dengan hasil sebesar 999, artinya DP2KBP3A mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya. Pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dengan hasil sebesar 545, artinya DP2KBP3A mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya. Pada tahun anggaran 2019 kembali mengalami penurunan dengan hasil sebesar 141, namun DP2KBP3A tetap mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya karena angka rasio masih diatas angka 1 (satu).

2. Rasio Solvabilitas (*Debt to Asset Ratio*)

Dihitung dengan cara:

$$Rasio\ Solvabilitas\ (Debt\ to\ Asset\ Ratio) = \frac{Total\ Utang}{Total\ Asset} \times 100\%$$

Tabel 2 Rasio DAR Tahun Anggaran 2016-2019

No	Tahun Anggaran	Rasio DER
1	2016	0.036396
2	2017	0.035449
3	2018	0.034628
4	2019	0.051631

Sumber:Data Skunder di olah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas pada tabel 2 diatas, rasio utang terhadap ekuitas DP2KBP3A pada tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2019 berada di bawah angka 1 (satu). Ini menggambarkan kinerja DP2KBP3A dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik dimana hal ini ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Dihitung dengan cara:

$$Efisiensi\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Tabel 3 Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2016-2019

No	Tahun Anggaran	Rasio Efisiensi
1	2016	87%
2	2017	93%
3	2018	88%
4	2019	94 %

Sumber:Data Skunder di olah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja pada table 3 diatas, Rasio efisiensi tahun 2016 sebesar 87% menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun 2016 berada dalam kondisi efisiensi. Tahun 2017 nilai rasio efisiensi meningkat menjadi 93%, nilai 93% ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun

2016 berada dalam kondisi efisiensi. Tahun 2018 nilai rasio efisiensi menurun menjadi 88%, nilai 88% ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun 2016 berada dalam kondisi efisiensi. Tahun 2019 nilai rasio efisiensi meningkat menjadi 94%, nilai 94% ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun 2016 berada dalam kondisi efisiensi.

4. KESIMPULAN

1. Kinerja keuangan pada DP2KBP3A ditinjau dari rasio likuiditas yang diukur, dengan *current ratio* (rasio lancar) pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan nilai rata-rata *current ratio* selama kurun waktu empat tahun berturut-turut sudah mencapai tingkat rasio lebih dari 1 meskipun dari tahun ke tahunnya masih mengalami penurunan.
2. Kinerja keuangan DP2KBP3A ditinjau dari rasio solvabilitas yang diukur dari *Debt to Asset Ratio* pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan sudah baik karena berdasarkan hasil perhitungannya berada di bawah angka 1 (satu). Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan DP2KBP3A yang diukur dari *Debt to Asset Ratio* dapat dikatakan sudah baik karena DP2KBP3A mampu menutup hutangnya melalui aktivasinya sendiri dengan cukup baik.
3. Rasio efisiensi tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, hal ini dapat dilihat dari nilai rasio efisiensi rata-rata diatas angka 80% sehingga berada dalam kondisi efisiensi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Delima, Ayu, Marwa, Taufiq dan Yulianita, Anna. Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (2), 69-78. <https://doi.org/10.29259/jep.v14i2.8819>.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga,. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/105TAHUN2000PP.HTM>
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Hery (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi, Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 7 (1), 81-92